

POLA DEMOKRASI YANG DIKEMBANGKAN PENDIRI BANGSA

Hariyono

Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang

hariyono.sej@um.ac.id

ABSTRACT

The founding fathers have concerned with democracy since the early struggle of nation independence. They have considered that Indonesian people could not develop their justice and prosperity without democracy. Colonialism and feudalism had influenced mentality and character of Indonesian people as an inferior personality. Considering those situation, the founding fathers attempted to develop a daily democratic system which is practiced in government system. In general, there are two existing models of democracy which is developing, that are, the cultural democracy and the radical democracy. The cultural democracy model tends to develop as a gradual process and their supporters could cooperate with the colonial government. On the contrary, the radical democracy model assumed that democracy, included economic and political aspects and also their supporter, could not cooperate with the colonial government.

Keywords: The Founding Father's, cultural democracy and radical democracy.

ABSTRAK

Para pendiri bangsa telah peduli dengan demokrasi sejak perjuangan awal kemerdekaan bangsa. Mereka menganggap bahwa orang Indonesia tidak bisa berkembang menuju keadilan dan kesejahteraan tanpa demokrasi. Kolonialisme dan feodalisme telah mempengaruhi mentalitas dan karakter bangsa Indonesia sebagai pribadi yang rendah. Melihat situasi tersebut para pendiri bangsa berusaha mengembangkan sistem demokrasi dalam kehidupan sehari-hari yang dipraktikkan dalam sistem pemerintah. Secara umum, model demokrasi yang berkembang dapat dibedakan dalam dua model, yang merupakan demokrasi budaya dan demokrasi radikal. Model demokrasi budaya cenderung berkembang sebagai rangkaian proses bertahap dan pendukungnya bisa kerjasama dengan pemerintah kolonial. Sebaliknya, model demokrasi radikal berasumsi bahwa demokrasi termasuk baik aspek ekonomi dan politik dan kerjasamanya tidak bisa dengan pemerintah kolonial.

Kata kunci: pendiri bangsa, demokrasi kulrural, demokrasi radikal.

PENDAHULUAN

Kajian-kajian terhadap praktik demokrasi di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Pasca jatuhnya demokrasi liberal, Herberth Feith (1962) telah berusaha melacak kejatuhan demokrasi liberal yang disebabkan oleh gagalnya kelompok "administrator" dalam melakukan konsolidasi dan manajemen kekuasaan. Kalangan Indonesianis yang disponsori oleh Universitas Cornell juga sempat melakukan kajian yang serius

dan intens tentang kegagalan demokrasi di Indonesia. Daniel Lev (1966) melakukan kajian yang cukup komprehensif terhadap proses dan praktik politik di akhir Demokrasi Liberal dan awal Demokrasi Terpimpin. Harry J. Benda (1964) dan Anderson (1972) beranggapan kegagalan demokrasi di Indonesia disebabkan oleh budaya patrimonial dan otoriter. Nilai-nilai budaya masyarakat di nusantara kurang kondusif untuk mengembangkan demokrasi ala Barat.

Sementara itu menurut Buyung Nasution (1995) kegagalan demokrasi liberal disebabkan oleh intervensi Presiden Soekarno dan militer. Pandangan Nasution berbeda dengan hasil kajian Kahin dan istrinya (1995). Mereka mengungkapkan keberadaan pemerintahan otoritarian di masa Demokrasi Terpimpin tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perang dingin. Intervensi Amerika yang membangun kolaborasi dengan kekuatan partai dan oknum politik untuk melawan komunisme membawa eksistensi timbulnya disintegrasi nasional. Pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi adalah salah satu bagian dari manuver nekolim yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia waktu itu.

Kajian tentang perkembangan demokrasi di Indonesia juga dilakukan di Australia. *Monash University's Centre of Southeast Studies* pada bulan Desember 1992 mengadakan suatu konferensi yang secara khusus mengkaji pelbagai masalah demokrasi yang berlangsung di Indonesia (Bourcheir & Legge, 1994). Banyak artikel seminar tersebut yang beranggapan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi akan memunculkan kelompok menengah dan akan menjadi pilar kehidupan demokrasi di Indonesia.

Sayangnya, kajian-kajian diatas belum ada yang secara intens mengkaitkan perjalanan praktek demokrasi dengan konstruksi demokrasi yang dibangun oleh para pendiri bangsa. Proses demokratisasi yang dipraktekkan oleh bangsa Indonesia pasca proklamasi belum dikaitkan dengan rekonstruksi dasar-dasar fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara -termasuk demokrasi, yang dikembangkan pendiri bangsa. Mayoritas pendiri bangsa mengidolakan pemerintahan Indonesia "di kemudian hari" bersifat demokratis. Para pendiri bangsa adalah arsitek ber-

dirinya NKRI. Apa dan bagaimana sosok demokrasi yang Dikembangkan oleh mereka dapat menjadi titik awal kajian dalam mengembangkan konsep dan praktek demokrasi setelah Indonesia Merdeka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, khususnya sejarah politik. Sebagai peristiwa dan proses politik, pelbagai peristiwa yang terkait dengan kekuasaan selalu terkait dengan pelbagai faktor lainnya, mulai dari faktor kebudayaan, ekonomi, sosial dan agama. Dalam konteks itulah penelitian ini selain membahas tentang peristiwa politik yang terkait dengan keberadaan anak-anak pergerakan dalam pergulatannya dalam menyusun dan mengembangkan konsep demokrasi juga dibahas tentang pelbagai aspek yang terkait dengannya. Secara sederhana proses penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi dan penulisan atau historiografi.

Sedangkan interpretasi yang digunakan adalah interpretasi hermeneutika Habermas. Dipilihnya hermeneutika Habermas dengan pertimbangan bahwa, bagi Habermas hermeneutika bukan sekedar menafsirkan, melainkan juga merealisasikan dalam dunia praksis. Pemahaman hermeneutik secara kritis dilakukan untuk kepentingan menciptakan pencerahan dan emansipasi. (McCarthy, 2008; 243).

Pemikiran Habermas tentang konsep "*refleksi ganda*" dalam Hermeneutika, menurut peneliti, sangat tepat digunakan untuk memotret kiprah anak-anak pergerakan dalam memperjuangkan demokrasi. Anak-anak pergerakan tidak saja memperjuangkan wacana demokrasi sebagai fokus perjuangan,

mereka juga melakukan perjuangan dan praktek demokrasi dalam perilaku keseharian.

Terkait dengan penelitian "Pemikiran Demokrasi oleh Pendiri Bangsa" peneliti berusaha untuk menempatkan interpretasi sebagai masalah yang primer sejajar dengan fakta-fakta yang ada. Dalam kaitan itulah sangat dimungkinkan dalam memilih data dan menyaringnya sebagai fakta yang dirangkai sebagai kisah berbeda dengan hasil-hasil penelitian dan atau penulisan sejarah di masa sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pandangan narativisme bahwa historiografi bukanlah satu-satunya sejarah (*the history*) sebagai kisah, melainkan hanya sebagai salah satu (*an history*) kisah tentang sejarah yang diteliti dan ditulis (Munslow, 1997, Bunzl, 1997). Proses analisis diusahakan selalu terbuka dengan adanya penemuan data dan atau kemungkinan munculnya dan atau dibutuhkannya interpretasi baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemunculan Sikap Penghambaan dalam Politik

Pada masa penjajahan terjadi pergeseran pusat dan sumber kekuasaan. Para raja pribumi tidak lagi menjadi penguasa utama. Mereka bukan lagi penguasa yang berdaulat dan mempunyai kewenangan mutlak. Sedangkan para bupati dan pejabat di bawahnya masih mendapat kebebasan mempertahankan posisinya sebagai penguasa selama mereka dianggap tidak membahayakan VOC atau pemerintah kolonial. Kekuasaan dan kewenangan mereka berjalan di daerahnya atas nama VOC atau pemerintah kolonial Belanda. Sistem *indirect rule* berhasil menjerat penguasa pribumi sebagai agen kekuasaan

asing. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah makin kuatnya elite yang lalim dan tidak mengakar pada rakyat namun patuh pada kekuasaan asing (Kahin, 1995: 6).

Elite pribumi dan bawahannya cenderung menghamba pada para pejabat kolonial. Pejabat Belanda diperlakukan sebagai kelompok superior. Proses dominasi dan hegemoni kekuasaan terhadap penguasa pribumi berlangsung secara efektif. Rasa rendah diri, inferior di kalangan pribumi terhadap mereka yang berkulit putih makin mendominasi cara pandang budaya pribumi (Sutherland, 1983).

Indikasi dari rasa inferior tersebut nampak dari bahasa tubuh dan pilihan bahasa lisan yang digunakan. Para pejabat pribumi bila menghadap pejabat yang lebih tinggi harus *jongkok*, membungkuk. Kondisi ini semakin mendorong terciptanya sikap dan mental *inferior* di kalangan pribumi. Mental menghamba terhadap bangsa kulit putih menyebabkan rasa percaya diri di kalangan elite pribumi semakin menipis. Mereka kemudian tinggal pasrah dan menyerah pada kekuasaan pemerintah kolonial. Cornelis Snouck Hurgronje dengan lugas menyatakan bahwa

Tanpa sepatah kata protes, tokoh tertinggi di antara mereka itu siap mengalihkan penghormatan tradisional bagi para raja mereka sendiri kepada orang-orang Eropa junjungan mereka; dengan suka rela mereka bersimpuh untuk membawakan semua perundangan yang diinginkan Belanda, asalkan kepentingan pribadi mereka sendiri sedapat mungkin masih dihormati (Nagazumi, 1989: 16).

Proses hegemoni yang terus menerus menyebabkan rakyat percaya bahwa bangsa kulit putih memang superior. *Mindset* rakyat Hindia Belanda menjadi *mindset* anak-anak jajahan yang

silau dengan kekuasaan penjajah. Menurut Soekarno

Edjekan jang terus menerus dipompakan oleh pemerintah Hindia Belanda tentang ketidakmampuan kami, menjebakkan kami jakin akan hal tersebut. Dan kejakinan bahwa engkau bangsa jang hina, lagi bodoh adalah suatu sendjata jang ada dalam tangan pendjajah. Imperialisme adalah kumpulan kekuatan djahat jang nampak dan jang tidak nampak" (Adams, 1966; 45)

Melalui sistem *verplichte leveranties* dan *contingenten* elite pribumi makin terjebak dalam sistem kolonial. Bila mereka berhasil mengumpulkan hasil bumi melebihi target mereka akan mendapatkan hadiah yang lebih dikenal dengan istilah *batig slot* (saldo lebih). Kondisi tersebut menyebabkan ketergantungan elite pribumi terhadap pemerintah kolonial menjadi makin tinggi. Posisi para pejabat pribumi tidak ubahnya telah bergeser menjadi *komprador* atau *centeng*.

Menggugat Ketidakadilan

Realitas yang tidak adil dan dianggap wajar oleh masyarakat mulai digugat oleh anak-anak yang berkecenderungan dengan dunia modern. Ahmad Rivai menyayangkan sikap orang-orang Indonesia yang belum menyadari betapa perlu berjuang bukan untuk kemajuan orang per orang, melainkan untuk kemajuan bersama seluruh negeri dan bangsa (Poeze, 2008: 50-51).

Pengetahuan modern, yaitu "budaya Barat" dan "pemikiran Islam" modern mampu membuka kesadaran anak-anak pergerakan akan penderitaan rakyat. Pengetahuan modern yang diperoleh dari sekolah modern dijadikan sebagai pisau analisis sehingga mampu memahami penderitaan rakyat

secara makro. Pisau analisis tersebut kemudian dijadikan diskursus pada rakyat melalui pelbagai pertemuan agar rakyat menyadari dan kemudian berani bangkit melawan kolonialisme (Sastroamidjojo, 1974; 87).

Mereka mengakui bahwa pencapaian kedudukan tinggi di nusantara belum didasarkan pada besarnya kemampuan atau luasnya pengetahuan (Poeze, 2008; 47). Perubahan *mindset* atau cara berpikir yang lebih mengandalkan pada aspek kemampuan (*achievement*) bukan disebabkan oleh faktor keturunan. Mereka telah menjadi kelompok sosial yang memiliki kesadaran dan identitas baru. Identitas mereka sebagai kalangan terdidik dengan kesadaran yang berbeda dengan generasi sebelumnya mencirikan sebagai sosok kelas "urban" yang baru. Kelompok yang oleh Kuntowijoyo (1991; 78) disebut sebagai golongan borjuis pribumi tersebut terdiri atas golongan cendekiawan dan pengusaha. Mereka tidak lagi bangga dengan identitas yang dibanggakan oleh orangtuanya. Munculnya golongan borjuis pribumi yang berasal dari kaum pengusaha dan cendekiawan membawa pengaruh yang signifikan terhadap dinamika sejarah masyarakat di nusantara sejak awal abad XX.

Gugatan terhadap sistem kekuasaan yang feodal dan kolonial diawali oleh anak-anak pergerakan. Kebebasan yang didambakan oleh anak-anak pergerakan selain menghadapi politik segregasi kolonial juga menghadapi klasifikasi masyarakatnya yang masih feodal. Sebagai individu yang terpelajar mereka menghadapi suatu kenyataan hidup yang memperlakukan dirinya tidak adil. Mereka tidak diberi kesempatan, penguasaan dan hak yang sama dengan orang-orang Belanda. Diskriminasi telah melecehkan nilai-nilai kebebasan, persamaan dan kemanusiaan. Kondisi tersebut hanya dapat dihilangkan oleh tatanan

kehidupan yang demokratis.

Sejak dibangku belajar mereka sudah merasakan bagaimana sistem yang ada telah melecehkan harga diri dan martabatnya. Mereka cenderung diperlakukan berbeda dengan anak-anak Eropa, Indo bahkan dengan anak-anak Timur Asing. (Van Niel, 1984; 80). Pengalaman hidup yang diskriminatif telah melukai hati dan perasaannya sebagai seorang yang terpelajar. Konsekuensi dari mental baru tersebut adalah sikap yang tidak mau menerima penjajahan dalam bentuk apapun (Alfian, 1999; xxv).

Sebagai sosok pribadi terdidik, mereka sulit memahami adanya kekuasaan yang hanya didominasi oleh kelompok tertentu. Dominasi dan monopoli kekuasaan oleh kaum bangsawan maupun pemerintah kolonial mulai dipertanyakan. Perlakuan yang tidak adil mengusik hati nurani mereka. Relasi sosial-budaya yang sebelumnya dianggap wajar mulai dipertanyakan. Ketidakadilan dalam relasi antar manusia mulai digugat.

Tokoh legendaris R.M. Tirtoadisurjo yang telah diakui sebagai bapak pers nasional melalui pelbagai tulisan dan pembelaannya terhadap rakyat telah menjadi penggoncang kesadaran bumiputera untuk bangun dari tidurnya (Toer, 1985; 7). Perbuatan yang sebelumnya dianggap tidak mungkin –misalnya menuntut pejabat yang salah oleh rakyat-- ternyata menjadi mungkin dalam perjuangan Adisurjo. Baik melalui pers maupun posisinya sebagai advokat, Tirtoadisurjo mampu menyadarkan rakyat bahwa ketidakadilan yang dilakukan elite pribumi maupun Eropa dapat dilawan. Demikian halnya anak-anak pergerakan sekaliber dr. Wahidin dan dr. Ciptomangunkusumo serta yang lain berusaha melawan ketidakadilan yang terjadi. Mereka berusaha membongkar kesadaran magis dan

sikap fatalistis rakyat melalui pelbagai pendekatan, terutama melalui upaya pendidikan.

Kunci untuk melawan kolonialisme dan feodalisme adalah membangkitkan kesadaran rakyat sekaligus memperjuangkan peluang bagi rakyat untuk berkembang secara wajar. Mereka sadar bahwa selama dalam masa penjajahan, rakyat tidak dapat ruang untuk mengembangkan jati dirinya secara maksimal. Adanya transisi struktural masyarakat di nusantara serta perubahan kebijakan pihak kolonial dianggap sebagai peluang untuk memperjuangkan rakyat. Mereka tidak ingin kesempatan untuk menyemai kesadaran rakyat dan memperjuangkan demokrasi hilang begitu saja. Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa ada perjuangan mengubah sistem yang ada sekaligus mengubah *mindset* rakyat tentang hakekat kekuasaan.

Akar Perubahan

Munculnya anak-anak pergerakan yang mempunyai cara pandang baru dan kemudian menjadi elite baru/modern disebabkan oleh dua faktor yang melatarbelakangi. Kedua faktor tersebut adalah perubahan sistem politik-ekonomi yang modern dan berdirinya lembaga pendidikan modern.

Perubahan industri di beberapa kota besar di nusantara telah menciptakan perubahan struktur sosial pada masyarakat nusantara di awal abad XX. Imperialisme modern yang berlangsung di Indonesia telah menuntut perubahan pengelolaan ekonomi tradisional menjadi modern. Muncul pelbagai perkebunan besar untuk memenuhi kebutuhan ekspor pasar dunia. Sistem ekonomi barang mulai digeser dengan ekonomi uang. Pertumbuhan industri dan atau perkebunan baru membawa pengaruh

terhadap struktur sosial. Diperlukan pelatihan atau sekolah guna menghasilkan tenaga kerja yang terampil. Kebutuhan akan tenaga terampil bagi industri dan atau perkebunan modern itulah yang ikut mempengaruhi mengapa di nusantara kemudian didirikan sekolah-sekolah modern. Untuk memperoleh pekerja yang terampil dan mengerti baca tulis tidak ada pilihan kecuali mencari lulusan sekolah modern. Kebutuhan dunia bisnis yang baru tersebut menjadi salah satu pendorong munculnya sekolah-sekolah modern.

Perubahan struktur ekonomi dan politik yang mengalami perubahan fundamental telah menghasilkan kebutuhan tenaga terdidik. Lembaga pendidikan modern walaupun diorientasikan untuk memenuhi tenaga kerja terampil namun juga membawa efek yang tidak dikehendaki (*unintended results*) pemerintah kolonial yaitu tumbuhnya kesadaran dan identitas baru. Perkenalan pengetahuan modern menimbulkan persepsi diri sebagian anak-anak terdidik pribumi dalam melihat realitas. Mereka mampu melihat realitas kekuasaan kolonial dan feodal yang tidak adil.

Pengenalan anak-anak pergerakan dengan ilmu pengetahuan modern telah mengubah dunia mereka. Perubahan persepsi tidak hanya dalam melihat dunia fisik, melainkan juga dunia sosial dan dunia batinnya sendiri. Terjadi suatu lompatan kesadaran yang cukup signifikan terhadap kosmologi anak-anak terdidik. Sebagian besar di antara mereka setuju dengan "semangat kemajuan", suatu pandangan yang menuntut adanya kerja keras serta meninggalkan kebiasaan lama yang dianggap tidak sesuai lagi dengan "semangat kemajuan". Sebagai orang yang terdidik mereka mempunyai cara pandang kehidupan yang berbeda dengan generasi sebelumnya dan sejamannya yang belum bersentuhan dengan pengetahuan

modern.

Anak-anak pergerakan mulai ada yang mempertanyakan tradisi dan budaya jamannya, termasuk konsep kekuasaan yang bersifat "magis religius". Mereka prihatin dengan nasib rakyat yang eksistensinya belum diakui sebagai *demos*, baik oleh sistem budaya bangsanya maupun oleh sistem kolonial. Kartosuwirjo (1907- 1962) menyatakan bahwa

Semendjak zaman keradjaan Padjadjaran sampai zaman Browidjojo, maka jang boleh dianggap merdeka tjoema radjanja sadja. Tetapi rakjatnja sedjak zaman itoe sampai ini waktoe tetap tinggal dalam gelombang penghambaan dan perhinaan jang serendah-rendahnja dan sedalam-dalamnja... Begitulah gambarnja nasib ra'jat Indonesia pada zaman ini, jang katanja zaman kemadjoean, zaman modern. Semoeanja itoe hanja katanja sadja, stelsel jang dipakai dan diperlakukannja, tetapi seperti beberapa poeleoh abad jang doeloe, ra'jat tetap tidak mempoenjai keleloeasaan. Pendek kata, ra'jat tetap menjadi hamba jang serendah-rendahnja, jang boleh dipersamakan dengan boedak belian, jang dapat diperbuat atasnja sebagai mana kehendak madjikannya. (Fadjar Asia, 12- 14-2-1929)

Perubahan *mindset* anak-anak pergerakan menyebabkan cara dan gaya hidup mereka berbeda. Mereka lebih mengakui usaha kerja keras dibanding sekedar penghargaan terhadap gelar yang diperoleh karena keturunan. Etos belajar yang tinggi telah menjadi pembuktian akan keseriusan mereka untuk diakui sederajat dan bermartabat sejajar dengan bangsa-bangsa kulit putih.

Mengembangkan Demokrasi

Para pendiri bangsa tidak menginginkan rakyat hanya berdaulat

dalam bidang politik namun tidak berdaya dalam bidang ekonomi. Mereka sudah berkenalan dengan pemikiran dan praktek demokrasi Yunani, memahami prinsip demokrasi yang menekankan pada "*Trias Politika*" hingga pemikiran besar Hegel, Marx dan yang lain.

Sejak awal pergerakan, anak-anak pergerakan sudah mengarahkan berdirinya suatu negara yang demokratis dan masyarakat yang sosialis melalui paham kebangsaan (Kleden, 2003: 238). Keterpurukan masyarakat pada saat itu dianggap tidak semata-mata disebabkan oleh sikap malas, melainkan oleh eksploitasi sistem yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Martabat manusia dalam sistem feodalisme maupun kolonialisme tidak diakui secara adil. Kolonialisme dan feodalisme toleran dan permisif terhadap eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain, "*exploitation de l'homme par l'homme*". Sebuah istilah yang digunakan oleh anak-anak pergerakan untuk menjelaskan keserakahan manusia terhadap sesama.

Demokrasi telah menjadi salah satu credo yang menonjol dari anak-anak pergerakan. Rakyat perlu disadarkan akan kondisi yang memprihatinkan. Rakyat diajak berjuang untuk menjadi manusia dan bangsa yang mandiri, bukan pribadi atau bangsa yang diperintah melulu. Dikatakan bahwa

Hidoep seperti sekarang ini mendjadi manoesia jang terperentah-*overheerschende volk*- boekanlah termasoek dalam bagian manoesia sedjati, tapi masih masoek bagian manoesia bodoh, karena orang jang bodoh itoelah jang maoe diperentah orang". (Peroebahan, 21-5-1919)

Anak-anak pergerakan sudah mengutamakan otonomi diri dalam kehidupan sosial-kultural. Mereka berani mengambil jarak sekaligus ingin mela-

kukan perubahan terhadap masyarakat pribumi. Kedaulatan rakyat yang telah lama dirampas oleh kolonialisme dan feodalisme yang kuat perlu dibongkar. Pintu masuk untuk membongkar kesadaran palsu rakyat yang sudah membeku adalah melalui proses pendidikan.

Dua Model Demokrasi

Pada masa pergerakan anak-anak pergerakan berusaha menyusun pelbagai model perjuangan termasuk model demokrasi yang dianggap relevan bagi bangsa Indonesia. Baik penganut demokrasi kultural maupun demokrasi radikal berusaha mempersiapkan rakyat melalui pendidikan agar demokrasi tidak menghasilkan anarki. Dalam memperjuangkan demokrasi secara umum perjuangan mereka dapat dikategorikan dalam dua model demokrasi yaitu demokrasi kultural dan demokrasi radikal.

Pendukung demokrasi kultural adalah mereka yang telah mengalami perubahan persepsi diri namun ingin tetap memiliki jati diri yang sesuai dengan semangat dan nilai-nilai luhur bangsanya. Mereka menginginkan perubahan berlangsung secara evolusioner pada masyarakat nusantara. Menurutnya keterbatasan pada diri manusia serta keterikatan dengan budaya yang diwarisi dari nenek moyangnya tidak memungkinkan perubahan dilakukan dengan cara radikal. Perubahan persepsi dan tatanan kehidupan sosial-budaya memerlukan suatu proses.

Konsekuensi dari pengembangan demokrasi yang tidak terpisah dari budaya, menyebabkan kelompok pendukung ini cenderung memilih jalan yang tidak radikal. Proses perjuangan demokrasi dilakukan secara gradual. Bagi mereka demokrasi itu baik. Namun, proses demokrasi yang tidak diiringi oleh kematangan dan kualitas yang baik

dari rakyat, dikhawatirkan hanya akan menghasilkan perebutan kekuasaan yang bersifat banal.

Rakyat atau *demos* memang secara ideal menjadi pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Kekuasaan selalu menuntut adanya suatu pertanggungjawaban. Hanya mereka yang sudah mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup yang dapat mempertanggungjawabkan kekuasaan yang melekat pada dirinya. Partisipasi rakyat dalam kehidupan demokrasi menuntut adanya kualitas tertentu yang perlu dimiliki oleh rakyat. Kualitas tersebut diperlukan agar dalam menentukan keputusan politik dapat lebih berkualitas dan bertanggungjawab.

Demokrasi menurut mereka membutuhkan proses dan pembelajaran. Penerapan demokrasi perlu diberlakukan secara selektif. Rakyat yang masih terbelenggu oleh kemiskinan, masih buta huruf dan tinggal dalam budaya feodal sulit merealisasikan demokrasi secara baik. Diperlukan suatu proses untuk mematangkan rakyat agar mereka dapat memiliki wawasan luas, dapat diajak berpikir dan menerapkan budaya demokrasi.

Sebagian dari pendukung kelompok ini ada yang *a priori* dengan kedaulatan rakyat. Mereka mengusulkan pembatasan terhadap hak yang dapat diperoleh rakyat. Noto-Soeroto mengusulkan dibentuknya suatu sistem "*aristo-democratie*" (van Miert, 2003; 146). Pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan oleh para pemimpin yang sudah mengerti akan hak dan kewajiban, bukan rakyat yang masih bodoh dan terbelakang.

Beberapa pimpinan organisasi politik menuntut pada pemerintah kolonial untuk memberi kelonggaran dan kesempatan rakyat bumiputera belajar berdemokrasi. Cokroaminoto dalam pidato pembukaan kongres CSI tanggal 18

Juni 1916 menuntut pada pemerintah kolonial Belanda untuk segera merealisasikan pemerintahan sendiri, *zelfbestuur*. Menurutny bila pemerintah belum dapat memberikan pemerintahan sendiri rakyat diberi hak untuk turut membicarakan urusan pemerintahan (*Sinar Djawa*, 3 Juli 1916).

Cokroaminoto menuntut perwakilan di *Volsksraad* benar-benar dipilih dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Menurutny, memilih bukanlah hak, tapi kewajiban bagi tiap rakyat yang sudah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban memilih berarti kewajiban bagi rakyat untuk membuktikan dirinya sebagai anggota dari suatu negara, kewajiban untuk melihat negaranya sendiri, kewajiban rakyat untuk bekerja bagi kepentingan nusa dan bangsanya (Cokroaminoto, 1981; 291). Cokroaminoto juga menertawakan peraturan mengenai hak pilih atau *kiesrecht* yang 'dihadiahkan' pemerintah kolonial bagi penduduk pribumi yang pandai berbahasa Belanda dan berpenghasilan minimal f. 50,-/bulan, yang tentu saja akan sulit sekali ditemukan kecuali di kalangan priyayi *ambtenar*.

Tuntutan akan persamaan dan hak-hak penduduk dalam bidang politik juga dikemukakan oleh Agus Salim. Ia membandingkan antara *grondwet* Belanda dan *Regeerings Reglement* (RR) Hindia Belanda tentang hak-hak penduduk. RR harusnya tak boleh bertentangan dengan *grondwet*, namun dalam masalah hak terdapat perbedaan yang mencolok antara keduanya. *Grondwet* memberikan jaminan kebebasan dan hak yang luas bagi semua orang yang tinggal di tanah kerajaan, namun tidak demikian dengan RR. Jika di negeri Belanda orang asing tak boleh menduduki jabatan dalam pemerintahan, maka di tanah koloni sebisa mungkin penduduk pribumi tidak menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Ke-

bebasan mengemukakan pendapat, berserikat dan berkumpul dijamin sepenuhnya di negeri Belanda, tapi tidak di tanah koloni (Salim, 1981; 45).

Kalangan pendukung demokrasi moderat cukup optimis bahwa perkembangan demokrasi dalam batas-batas tertentu akan membantu bangsa Indonesia menuju kematangan politik dalam berdemokrasi. Keberadaan *Volksraad* dengan kekuasaan yang terbatas dianggap sebagai langkah awal untuk memperjuangkan kehidupan demokrasi, termasuk di dalamnya memperjuangkan lembaga *Volksraad* sebagai lembaga yang tidak hanya berperan sebagai penasihat gubernur jenderal.

Di akhir kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, tokoh-tokoh pergerakan yang menjalankan politik kooperasi dan duduk di *Volksraad* menuntut adanya parlemen. Dalam perang Dunia II pihak Belanda berhadapan dengan kekuatan Fasis untuk itu diperlukan dukungan dari penduduk pribumi. Sebagai kompensasi dari dukungan masyarakat pribumi, sebagian tokoh pergerakan menuntut dibentuknya parlemen. Tuntutan pembentukan parlemen yang paling terkenal diajukan oleh anggota *Volksraad*, Soetardjo (*Pemandangan*, 15-7-1936). Sedangkan Tuntutan pembentukan parlemen yang cukup utuh disampaikan oleh GAPI (Gabungan Partai-partai Politik Indonesia) dan KRI (Kongres Rakyat Indonesia).

Berbeda dengan golongan moderat sebagian anak-anak pergerakan berusaha memperjuangkan demokrasi secara radikal. Mereka tidak ingin memperjuangkan bangsa dan negaranya dengan cara "merengek-rengok" pada pihak penjajah. Mereka lebih memilih perjuangan dengan taktik non kooperasi. Prinsip non kooperasi merupakan realisasi dari kepercayaan mereka terhadap perjuangan di atas kekuatan dan

kemampuan sendiri, "*strijd op eigen kracht en kunnen*". (Simbolon, 1980; 49)

Mereka juga beranggapan bahwa demokrasi tidak hanya sebatas prosedur yang didasarkan pada suara terbanyak. Demokrasi juga tidak hanya sebatas dimensi politik. Demokrasi yang dibutuhkan Indonesia adalah demokrasi yang menyangkut dimensi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan yang semacam itu peneliti maksudkan sebagai bagian dari demokrasi radikal.

Upaya memperjuangkan demokrasi radikal secara kelembagaan dilakukan oleh *Indische Party*. Partai yang didirikan oleh Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat ini secara tegas menginginkan adanya perlakuan yang setara antar bangsa yang tinggal di Hindia Belanda. Dalam statuta partai (*Indische Party*) pasal 2 disebutkan bahwa

Tujuan IP adalah untuk membangkitkan patriotisme semua orang Hindia terhadap tanah air yang memberi makan mereka, agar mereka bekerja sama atas dasar kesetaraan politis (semua ras) untuk membuat tanah air Hindia berkembang dan bersiap merdeka demi rakyatnya".

IP merupakan partai pertama yang menuntut secara tegas adanya Indonesia yang merdeka dan bebas atau terlepas dari Belanda, "*Indie los van Holland*". (Sastroamidjojo, 1974; 76). "Citranya tentang kemerdekaan adalah 'Nation Hindia', suatu negara yang merdeka dan demokratis, dimana semua ras dan suku bangsa memiliki hak-hak yang sama" (van Miert, 2003; 30).

Salah satu penghambat praktik demokrasi pada saat itu menurut pendukung demokrasi radikal adalah sikap elitisme. Sukarno sangat anti terhadap elitisme (Wardaya, 2006; 42-46). Sukarno tidak ingin menerapkan demokrasi parlementer yang dipraktekkan di Barat. Demokrasi borjuis dianggap hanya me-

nempatkan rakyat sebagai tuan dalam aspek teknis politik (baca pemilu) sedangkan dalam urusan ekonomi rakyat tidak berdaya dan hanya menjadi budak belian. Demokrasi yang diidamkan adalah demokrasi yang mengkaitkan sosio-nasionalisme dengan sosio-demokrasi. Suatu nasionalisme yang bermaksud menjari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki (Sukarno, 1965: 175)

Anak-anak pergerakan yang menuntut ilmu di luar negeri, terutama mereka yang berkiprah di Perhimpunan Indonesia (PI) mengembangkan wacana demokrasi yang lebih radikal. PI secara sadar berusaha melakukan emansipasi politik (Kartodirdjo, 2005; 8). Secara eksplisit dalam program PI disebutkan lima program yang semuanya terkait dengan demokrasi (Ingleson, 1983; 26-27). Kelima program tersebut adalah; (1) hak menentukan nasib sendiri untuk rakyat Indonesia; (2) suatu bentuk pemerintahan di masa depan atas dasar yang sepenuhnya demokratis dengan masyarakat desa sebagai unsur terpenting; (3) kebebasan pers dan hak mengadakan perserikatan dan pertemuan terbuka tanpa pembatasan-pembatasan; (4) penghapusan hak-hak istimewa dari gubernur jenderal, dan (5) hak pilih yang universal.

Dari ke lima prinsip tersebut sangat kentara bahwa PI tidak hanya sekadar menuntut kemerdekaan bagi Indonesia. PI juga berusaha menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang demokratis. Bagi tokoh-tokoh PI "*kedaulatan rakyat*" dapat menggantikan "*daulat tuan*" yang masih kuat pengaruhnya terhadap *mindset* masyarakat di nusantara. Mereka mengharapkan rakyat tidak terkungkung dalam perhambaan. Indonesia yang merdeka hanya dapat jaya dan kuat dengan dukungan rakyat yang merdeka.

Menurut Hatta cita-cita kedaula-

tan rakyat harus ditanamkan sejak dini pada sanubari rakyat agar kelak setelah merdeka rakyat tidak ditindas oleh golongan elite penguasa. Rakyat harus dibuat insyaf bahwa dirinya adalah pemegang kedaulatan sekaligus insyaf akan harga dirinya sebagai manusia yang bermartabat. Kesadaran rakyat akan demokrasi dapat meminimalisasi kecenderungan kaum ningrat yang didukung oleh cerdik-pandai untuk memonopoli kekuasaan. Baginya suatu negara yang merdeka akan kuat dan maju kalau rakyat ikut menentukan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. (Hatta, 1982: 45).

Hatta berusaha memberdayakan rakyat sekaligus menghindarkan diri dari praktek demokrasi parlementer *ala* borjuis yang memisahkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Bukan sesuatu yang kebetulan kalau Hatta selain berusaha memperjuangkan rakyat dilibatkan dalam proses pendidikan juga mengajak rakyat untuk mengembangkan koperasi. Melalui koperasi dapat dilakukan demokrasi ekonomi sekaligus mengajak rakyat berjuang mencapai tatanan sosialisme dengan pemilikan bersama (Kleden: 2003; 239).

Sifat radikal dari pemimpin PI mendorong untuk lebih mandiri dan tidak tergantung dengan pihak Belanda. Imperialisme modern telah menempatkan daerah jajahan sebagai pasar untuk penghasilan industri sekaligus daerah pemasok bahan mentah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan pada masyarakat pribumi. "Demokrasi politik' di negeri penjajah tidak saja menganak tirikan rakyat negeri itu sendiri, melainkan juga menumpas rakyat jajahan. Kondisi tersebut menurut Hatta tidak cocok untuk diterapkan pada Indonesia Merdeka kelak. Hatta mengusulkan adanya "demokrasi ekonomi" yang memakai dasar, bahwa

segala penghasilan yang mengenai penghidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga.

Pemikiran demokrasi radikal berusaha mengantisipasi kelemahan demokrasi yang berkembang pasca revolusi Perancis. Demokrasi diharapkan tidak hanya menguntungkan sekelompok kecil masyarakat, yaitu kelompok borjuis. Kehidupan politik di era penjajahan yang penuh eksploitasi memberikan sumbangsih pada persepsi mereka terhadap sistem demokrasi borjuis yang hanya menempatkan demokrasi dalam tataran teknis politik dan mengabaikan demokrasi di bidang sosial dan ekonomi.

Pemikiran demokrasi yang revolusioner juga ada yang berangkat dan atau terinspirasi oleh pemikiran sosialisme dan atau Marxisme. Tokoh ISDV, *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging*, Hendicus Johannes Fransiscus Marei Sneevliet (1883 - 1942) adalah agen komunis internasional yang pertama kali membawa ajaran Marxis-komunis, termasuk demokrasi revolusioner, ke Indonesia. Dia berusaha mengajak rakyat Indonesia menganut ideologi Marxis-komunis sekaligus berusaha mengembangkan demokrasi kerakyatan. Tokoh-tokoh komunis belajar dari Sneevliet menggunakan analisis Marxis dalam memahami realitas sosial politik ekonomi yang menyebabkan kesengsaraan rakyat Indonesia (Gie, 1999: 26).

Pada tahun 1928 Hatta dengan tegas menyatakan akan pentingnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dengan mendasarkan pada kekuatan sendiri. Bangsa Indonesia tidak boleh mengandalkan kekuatan asing, termasuk kekuatan sosialis internasional. Dia dengan tegas mengemukakan keputusan "*Liga Socialist Internasionale*" dalam kongresnya bulan Agustus 1928 yang mengusulkan Indo-

nesia untuk mempunyai semacam "*zelfbestuur*" (mengatur pemerintahan sendiri dibawah pimpinan Belanda). Menurutnya masalah penjajahan bukan mendasarkan pada prinsip "*klassentrijd*", melainkan terutama "*rassenstrijd*". Bangsa Indonesia harus konsisten mengembangkan prinsip *self-help*. "*Self-help oentoek beladjar menjoesoen penghidoepan sendiri, memperbaiki nasib social sendiri, memadjoekan ekonomi sendiri*". (Soleoh Indonesia Moeda, 9-1928)

Sukarno juga termasuk pendukung demokrasi revolusioner dengan sering menggunakan istilah "sosio-demokrasi".

Demokrasi-masyarakat, sosio-demokrasi --, adalah timbul karena sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi adalah pula demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya didalam masyarakat. Sosio-demokrasi tidak ingin mengabdikan kepentingan sesuatu gundukan ketjil sahadj, tetapi kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi bukanlah demokrasi ala Revolusi Perantjis, bukan demokrasi ala Amerika, ala Inggris, ala Nederland, ala Djerman d.l.l., -- tetapi ia adalah demokrasi sedjati yang menjtjari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan redjeki. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi-ekonomi". (Sukarno, 1965: 175).

Dalam kongres pertama PNI tanggal 28 Mei 1928 Soekarno menyatakan bahwa keinginan untuk merdeka merupakan penggerak terkuat dalam segala usaha ekonomi, sosial dan politik, tanpa harus mengharapkan bantuan dari pihak luar. PNI tidak mau bergabung dengan *Volksraad* yang dianggapnya tak lebih dari lembaga "komedi belaka". Kaum non-kooperasi menganggap *Volksraad* tak bisa mewakili rakyat Indonesia. Wakil-wakil bumiputra menjadi kelompok minoritas dalam *Volksraad* yang didominasi oleh wakil-wakil bangsa

Eropa sehingga "soearanja boemipoetra jang 48.000.0000 kalah dengan jang 160.000 jalah dari pihak Belanda". (Blemall, 1927, *Sinar Indonesia*, 5-11-1927) Akibatnya krisis politik dan ekonomi tak terhindarkan dan makin menyengsarakan rakyat tanpa ada perhatian yang serius dari *Volksraad*.

Wacana tentang demokrasi radikal mengalami kemunduran yang signifikan sejak awal tahun 1930-an. Tokoh-tokoh pendukung demokrasi liberal yang juga pemimpin PNI-Baru dan Partindo ditangkap dan dibuang. Pemerintah kolonial berusaha melakukan pembasmian terhadap pelbagai pemikiran dan pergerakan yang berusaha menggugat kekuasaan kolonial.

Ruang untuk mengembangkan pemikiran demokrasi radikal mengalami kemunduran di tahun 1930-an. Beberapa anak pergerakan di masa pendudukan banyak yang melakukan aktivitas bawah tanah. Salah satu gerakan bawah tanah yang kuat ada dalam jaringan Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia). Atas nama demokrasi mereka melakukan koalisi dengan kekuatan kapitalis dan imperialis untuk menghadapi ancaman fasisme yang berkembang pesat sejak akhir tahun 1930-an.

SIMPULAN

Blue-print demokrasi yang dikembangkan oleh para pendiri bangsa bergerak dari ranah yang bersifat pribadi meluas pada dimensi sosial dan politik. Pengalaman hidup anak-anak pergerakan sebagai pribadi yang sering diperlakukan tidak adil mendapat pemahaman baru setelah mereka berkenalan dengan pengetahuan modern. Proses berpikir mereka yang kritis dan reflektif mampu mengungkap adanya proses budaya yang dianggap tidak wajar. Mereka menggugat proses dehumanisasi yang

sedang berlangsung pada jamannya. Mereka menyadari bahwa rakyat nusantara tidak pernah mendapat kedaulatan dalam sistem feodal maupun kolonial. Penguasa kolonial dan penguasa pribumi sering menyalahgunakan kekuasaan akibat tiadanya kontrol dari rakyat. Rakyat selalu menjadi objek kekuasaan. Kekuasaan dalam sistem feodal maupun kolonial selalu berusaha mendominasi.

Kungkungan sistem feodal dan kolonial yang membelenggu kedaulatan rakyat menyebabkan rakyat selamanya tidak akan berdaulat. Mereka berusaha menemukan sistem kekuasaan yang memungkinkan untuk menempatkan rakyat berdaulat. Sistem tersebut adalah demokrasi.

Dalam rangka merebut kedaulatan politik itulah, para pendiri bangsa mempunyai cara pandang dan metode perjuangan yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang demokrasi. Secara umum konsepsi tentang demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi moderat dan demokrasi radikal.

Demokrasi evolusioner adalah konsep yang beranggapan bahwa demokrasi harus dilaksanakan secara gradual sesuai dengan kemampuan rakyat serta kondisi sosial-ekonomi-politik yang ada. Kelompok yang mendukung konsepsi ini umumnya menganut garis perjuangan yang kooperatif dengan pihak penjajah. Tokoh-tokoh yang bersedia bergabung dalam *Volksraad* adalah pendukung dari gerakan demokrasi evolusioner.

Sebaliknya mereka yang tidak bersedia bekerjasama dengan pihak penjajah adalah pendukung demokrasi radikal. Mereka tidak bersedia duduk di *Volksraad*, karena *Volksraad* hanya dianggap sebagai lembaga demokrasi semu. Lembaga ini mempunyai kelemahan,

yaitu pemilihan anggotanya tidak melibatkan rakyat, keanggotaannya didominasi wakil Belanda dan kewenangannya sangat terbatas, yaitu hanya sebatas sebagai penasihat pemerintah kolonial. Demokrasi diartikan sebagai kedaulatan rakyat yang tidak hanya sebatas berdaulat dalam bidang politik, melainkan juga berdaulat dalam bidang ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Dokumen Statuta *Indsche Party*.
Indische Staatsinrichting (Ketatanegaraan Hindia) tahun 1926

Surat Kabar

Fadjar Asia, 12-2-1929, tulisan Kartosuwirjo "Ra'iat dan Nasibnja".
Fadjar Asia, 14-2-1929, tulisan Kartosuwirjo "Bahaja jang mengantjam roeh dan djiwa ra'iat djadjahan".
Sinar Djawa, 3 Juli 1916
Sinar Indonesia 5 November 1927, Blemall. *Concurs Politiek!!!*.
Soeloeh Indonesia Moeda, September 1928, Moh. Hatta. "Socialist Internasional dan Kamerdekaan Indonesia".
Pemandangan, tanggal 15 Juli 1936 teks pidato Sutardjo Kartohadikusumo di sidang Volksraad tanggal 9 Juli 1936.
Peroebahan, 21 Mei 1919.

Buku

Adam, C. 1966. *Bung Karno; Penyambung Lidah Rakjat Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
Alfian. 1999. Pengantar edisi Indonesia. Dalam Harry A. Poeze. 1999. *Pergulatan menuju Republik, Tan Malaka 1925-1945*. Jakarta: Grafiti Press.
Anderson, B.A. 1972. "The Idea of Power in Javanese Culture". Dalam Claire Holt (Ed.). *Culture and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
Benda, H.J. 1964. "Democracy in Indonesia; A Review Article" in *Journal of Asian Studies*.

Bourcheir, D. & Legge, J. 1994. *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*. Victoria. Centre of Southeast Asian Studies.
Bunzl, M. 1997. *Real History, reflections on historical practice*. London and New York: Routledge.
Cokroaminoto, H.O.S. 1981. Nasionalisme, Sistem Pemerintahan dan Mandiri dalam Pitut Soeharto (Ed) *Cahaya di Kegelapan*. Jakarta: Jayasakti.
Feith, H. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
Gie, S.H. 1999. *Di Bawah Lentera Merah*. Yogyakarta: Bentang.
Hatta, M. 1982. Ke Arah Indonesia Merdeka. Dalam Miriam Budiardjo (ed.). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: Gramedia.
Ingelson, J. 1983. *Jalan Ke Pengasingan, Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927 - 1934*. Terj. Zamakhsyarsri Doffier. Jakarta: LP3ES.
Kahin, G.Mc.T. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Terj. Nin Bakdi Soemanto. Surakarta-Jakarta: Sebelas Maret University Press - Pustaka Sinar Harapan.
Kahin, G. Mc.T & Kahin, S. 1995. *Foreign Policy as Subversive*. Ithaca: Cornell University.
Kartodirdjo, S. 2005. *Sejak Indisch Sampai Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
Kleden, I. 2003. *Menulis Politik: Indonesia Sebagai Utopia*. Jakarta: Kompas.
Kuntowijoyo. 1991. *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
Lev, D.S. 1966. *Indonesian Politic 1957 - 1959, The Transition to Guide Democracy*. Ithaca: Cornell University.
McCarthy, T. 2008. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Munslow, A. 1997. *Deconstructing History*. London and New York: Routledge.
Nagazumi, A. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 - 1918*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Nasution, B. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Press.
Poeze, H.A. 1999. *Pergulatan Menuju Republik Tan Malaka 1925-1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

- 2008. *Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia-KITLV.
- H.A. Salim, 1981. Hak dalam Pitut Soeharto (Ed), *Belunggu Ganas* Jakarta: Jayasakti. hlm 41-74.
- Sastroamidjojo, A. 1974. *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*. Jakarta: PT Kinta.
- Simbolon, P.T. 1980. Mencari Dataran Berpikir Baru. Dalam *Prisma* No. 2 Tahun IX hal. 49-54.
- 1995. *Akar-Akar Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sukarno, 1965. *Dibawah Bendera Revolusi*. Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Terj. Sunarto. Jakarta: Sinar Harapan.
- Toer, P.A. 1985. *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra.
- Van Miert, H. 2003. *Dengan semangat Berko-bar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930*. Terj. Sudewa Satiman. Jakarta: Hasta Mitra: Pustaka Utan Kayu.
- Van Niel, R. 1984. *Munculnya Elit Modern*. Terj. Zahara D.N. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Wardaya, B.T. 2006. *Bung Karno Menggugat*. Jakarta: Gramedia.